



Buletin Parlementaria

Nomor 1079/III/XI/2019 • November 2019



KSATRIA PELINDUNG RAKYAT

Buka Ruang Dialog Selesaikan Masalah Papua

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER XVII
GENDERA WAWASAN



3 Ketua DPR Imbau Masyarakat Antisipasi Aksi Teorisme



5 Dorong Koperasi Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat



9 772614 339005

Buka Ruang Dialog Selesaikan Masalah Papua

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta aparat keamanan untuk membuka dan mengedepankan ruang dialog ketika menanggapi aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya kegiatan dialog tersebut merupakan alternatif yang tepat guna menjaga situasi keamanan di Papua dan Papua Barat tetap kondusif, pasca kerusuhan yang terjadi pada 19 Agustus 2019 lalu.

Hal tersebut disampaikannya kepada **Parlementaria** usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajarannya, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Gubernur

Papua, Jayapura, Papua, Jumat (8/11).

“Semua memang harus dilakukan dengan pendekatan dialog. Saya rasa tidak cukup dengan hanya mengedepankan gakkum (penegakan hukum), karena kita semua ini sama-sama warga negara Indonesia. Maka tidak boleh tertutup dialog antar bangsa. DPR paling utama mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Meutya juga mengaku, dirinya merasa lega bisa berkomunikasi langsung dengan tokoh-tokoh di Papua untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat Papua dalam keterlibatan mereka di NKRI. Menurutnya, apabila ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus kerusuhan yang melibatkan warga Papua, maka gakkum harus tetap diutamakan.

“Kami bisa memahami keinginan teman-teman, masukan dari masyarakat Papua terkait perlu adanya penegakan hukum. Saya rasa bentuk *statement* politik dari para Anggota akan membantu mendorong narasi tersebut. Dan saya rasa walaupun Kepolisian bukan mitra kerja Komisi I, tapi saya rasa mereka akan mengedepankan hal (penegakan hukum) itu,” tukas legislator dapil Sumatera Utara I ini.

Kunspek ini diikuti Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen (PDI-P), Sturman Panjaitan (PDI-P), HI Lodewijk Paulus (F-PG), Nurul Arifin (F-PG), Dave Akbarsyah Fikarno (F-PG), Sugiono (F-Gerindra), Yan Permenas Mandenas (F-Gerindra), Syaiful B. Anshori (F-PKB), dan Jazuli Juwaini (F-PKS). ■ er/sf



Tim Kunspek Komisi I DPR RI bertukar cenderamata dengan Wakil Gubernur Papua, Forkopimda dan para tokoh masyarakat Papua. Foto: Erlangga/HR



Ketua DPR Imbau Masyarakat Antisipasi Aksi Terorisme

Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan kegiatan seperti biasa, menyusul terjadinya aksi ledakan bom bunuh diri di area Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) pagi. Aksi ini membuat sejumlah petugas Polrestabes Medan mengalami luka-luka.

Kendati demikian, ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap serangan teroris. "Jangan takut, kita lawan, kita antisipasi dan tetap lakukan kegiatan sehari-hari, jangan sampai kita surut (berkegiatan)," ujar Puan, sapaan akrab Ketua DPR RI saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, antisipasi terhadap serangan terorisme juga memerlukan peran masyarakat, bukan hanya tugas kepolisian semata. Mengingat ada perubahan perilaku aksi teror, menurut Puan kebanyakan kasus terorisme saat ini dilakukan oleh individu bukan lagi kelompok.

"Kalau dulunya disampaikan bahwa terorisme dilakukan secara berjamaah, ternyata sekarang sudah dilakukan individu. Jadi, kita harus melakukan antisipasi bersama bagaimana

ke depannya tidak terjadi kembali, apalagi sudah berulang kali kejadiannya di objek-objek vital, salah satunya kantor polisi," jelas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Puan menambahkan, masyarakat harus bahu-membahu meningkatkan antisipasi bersama, sebab aksi terorisme justru kerap dilakukan di tempat yang dianggap aman. "Ada indikasi hal itu dilakukan di tempat yang aman, nah ini harus jadi antisipasi secara menyeluruh. Perlu kesadaran masyarakat untuk melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan," pesannya.

Sebagaimana diberitakan berbagai, terjadi ledakan bom bunuh diri di areal Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Rabu pagi. Pelaku bom bunuh diri disebut-sebut berjumlah satu orang, yang masuk ke lokasi dengan

menggunakan jaket ojek online. Akibat kejadian tersebut, sebanyak lima orang petugas dan satu orang pengunjung Polrestabes Medan mengalami luka-luka. ■ ann/sf

Ketua DPR RI Puan Maharani.
Foto: Kresno/HR



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Armanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

E-Parliament Segera Dikampanyekan



SAYA BERHARAP MASUKAN-MASUKAN DARI MAHASISWA YANG TENTUNYA POSITIF SEMUA, DAPAT MENJADI BAHAN ACUAN UNTUK MEMPERKUAT INSTITUSI DPR

(UI), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Dalam kesempatan memberikan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan dewan kepada mahasiswa FISIP UI itu, Azis menekankan bahwa era globalisasi harus jadi kesempatan bagi seluruh komponen rakyat Indonesia, tidak terkecuali mahasiswa untuk lebih kreatif dalam visi serta menerapkan kemampuan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar mahasiswa dapat menjadi sarana penyampai pesan positif mengenai tugas dan kewenangan dewan kepada masyarakat, karena mahasiswa di era milenial ini dianggap sebagai *trendsetter*. Ia menganggap sekecil apapun narasi yang diciptakan oleh mahasiswa, akan menjadi nilai berita yang bombastis.

“Mahasiswa menyampaikan bahwa mereka lebih terkenal dibanding Anggota Dewan. Untuk itu kita tantang mereka untuk menciptakan narasi positif tentang tugas dan kewenangan dewan yang telah mereka dapat hari ini untuk menciptakan narasi positif tentang anggota dewan di DPR. Saya berharap masukan-masukan dari mahasiswa yang tentunya positif semua, dapat menjadi bahan acuan untuk memperkuat institusi DPR,” jelas Azis. ■ *er/sf*



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Foto: Naefuroji/HR

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa E-Parliament akan dikampanyekan oleh DPR RI Periode 2019-2024. Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menuturkan, E-Parliament akan dimanfaatkan sebagai sarana membangun citra positif DPR RI di masyarakat yang selama ini terus luntur.

“Kita sampaikan bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan, kita dari Pimpinan berkomitmen bahwa DPR harus mengarah kepada *digital* parlemen, atau E-Parliament ini sedang masuk tahapan dan sudah beberapa kali kita masukkan dalam agenda rapat. Akan segera kita aplikasikan,” jelas Azis kepada perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Dorong Koperasi Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan

(Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan, akan berupaya membangkitkan koperasi yang nilainya semakin memudar. Menurutnya di dalam koperasi terdapat nilai-nilai mulia seperti musyawarah mufakat serta semangat untuk bergotong royong.

Demikian ia ungkapkan usai menerima aspirasi masyarakat Gorontalo di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). “Tentu lewat koperasi, saya ingin dorong perekonomian. Karena operasi itu merupakan penjabaran ekonomi Pancasila juga,” lanjut Gobel.

Menurut politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, koperasi merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang paling tepat untuk masyarakat. Sehingga program ini tidak boleh putus di tengah jalan atau pun gagal. Melalui koperasi, Gobel ingin mendorong terbentuknya industri pangan baik itu tanaman padi maupun dari sayuran yang ada di daerah khususnya di Gorontalo.

Masyarakat Gorontalo, lanjut Gobel, 70 persennya merupakan petani yang seringkali berhadapan dengan masalah klasik di bidang pertanian seperti kelangkaan pupuk dan bibit saat musim tanam. Masalah seperti ini harus segera diatasi agar produk pertanian bisa menjadi salah satu komoditas yang bisa dibanggakan.

“Kalau untuk menjadi komoditas nasional, saya rasa belum bisa

memenuhi. Tapi paling tidak bisa menjadi salah satu lumbung pangan,” harap Gobel sambil menerangkan bahwasanya lahan pertanian di Gorontalo sangat luas dan kalau dikelola dengan baik, akan memberikan hasil dan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, Gobel berkeyakinan akan mampu mengentaskan kemiskinan di Gorontalo dari posisi lima besar di Indonesia, menjadi lima besar termakmur di Indonesia. Bukan tidak mungkin ke depannya Gorontalo menjadi salah satu lumbung pangan

nasional.

“Saya minta, kita harus memulai, seperti apa yang sudah kita canangkan. Kita harus bekerja, serta merumuskan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan. Membangun kawasan Gorontalo sebagai kawasan ekonomi pariwisata harus kita wujudkan bersama,” imbau legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo itu. ■ es

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel. Foto: Andri/HR



Komisi I Dukung Perbaikan Sistem Pertahanan Nasional



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid berjabat tangan dengan Menhan Prabowo Subianto. Foto: Azka/HR

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid sebelum menutup Rapat Kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajaran, menuturkan semua fraksi di Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional. Salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung Bapak Menhan untuk memperbaiki pertahanan kita,” ujar Meutya di sela-sela Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). Menhan Prabowo didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono beserta seluruh jajaran Kemhan.

Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan ini membahas program kerja Kemhan selama lima tahun ke depan. Salah satunya, visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional. Selain itu, pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati juga disinggung oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI, namun sesi pembahasan anggaran diputuskan berlangsung secara tertutup.

Saat Raker berlangsung, beberapa Anggota Komisi I DPR RI menyinggung potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Anggota Komisi I DPR RI Sugiono berharap Kemhan dapat menyelesaikan permasalahan Papua yang hingga saat ini belum terselesaikan. “Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami

sampaikan nanti, dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan khususnya di Papua,” ucap Sugiono.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan semata, namun juga menyangkut kesejahteraan rakyat yang harus diambil kebijakan bersama Kementerian terkait. “Ini titipan suara dari prajurit di Papua, mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menhan Prabowo menyebutkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia. Modernisasi alutsista menjadi salah satu cara memperkuat pertahanan bangsa. Menurutnya, kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Sekalipun diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi. “Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekedar biaya,” ucap Menhan Prabowo.

Kendati kekuatan pertahanan Indonesia tertinggal secara teknologi, Menhan Prabowo menyampaikan jika harus terlibat perang, konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan. “Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan,” kata Prabowo. ■ ann/sf

Dialog Jadi Kunci Selesaikan Permasalahan Papua Barat

Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada 19 Agustus 2019 lalu mengejutkan sejumlah kalangan, tak terkecuali Komisi I DPR RI. Pasalnya, kerusuhan itu selain menyebabkan sejumlah korban luka, massa juga membakar eks Kantor Gubernur Papua Barat dan Gedung DPRD Papua Barat. Bahkan massa juga memblokir sejumlah ruas jalan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menekankan perlu adanya dialog untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Kharis usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Kasdam XVIII/Kasuari Dedi Sambowo, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), jajaran KPU Papua Barat, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Jumat (8/11). Kunspek ini guna melihat langkah-langkah antisipasi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Saya kira harus dibuka dialog dan komunikasi. Dalam pertemuan terungkap buntutnya komunikasi dan tersambatnya komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintahan di Jakarta. Saya kira, Pemerintah Pusat perlu lebih banyak mendengar (aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat). Mereka kita dengarkan, terus kemudian kita beri solusi, kira-kira apa yang *pas* untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Saya kira semangat mereka adalah semangat untuk membangun Papua dan Papua Barat dalam bingkai NKRI,” jelas Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menambahkan, selain dialog

dan komunikasi, guna mengatasi permasalahan di Papua Barat, perlu adanya pemberdayaan masyarakat. MRP menyampaikan, masyarakat Papua Barat tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam insiden 19 Agustus lalu itu, masyarakat Papua Barat memperjuangkan dan menuntut keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, serta perlunya afirmasi untuk masyarakat dan anak-anak Papua Barat.

“Anak-anak Papua Barat, termasuk Papua, sebagian mereka akan studi di luar Papua. Ini perlu ada afirmasi. Seperti yang disampaikan MRP, ada sebagian anak-anak yang berangkat ke IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Padahal seleksi di Papua sudah selesai, tapi sampai di sana tidak diterima. Ini masalah yang cukup

serius. Sehingga diharapkan, kalau bisa dana Otsus (Otonomi Khusus) separuh untuk infrastruktur, separuh untuk pemberdayaan masyarakat. Agar kesejahteraan mereka meningkat,” pungkas legislator dapil Jateng V itu.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap aspirasi lainnya, seperti keinginan MRP kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Kunspek ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono (F-Gerindra/dapil NTB II), Anggota Komisi I DPR RI Ilham Pangestu (F-Golkar/dapil Aceh II), Fadhlullah (F-Gerindra/dapil Aceh I), Hasan Saleh (F-Demokrat/dapil Kalimantan Utara), dan Sukamta (F-PKS/dapil DI Yogyakarta). ■ sf



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bertukar cenderamata dengan Wagub Papua Barat. Foto: Sofyan/HR

DOB Papua Butuh Inpres

Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres). Delegasi masyarakat Papua yang mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Tengah mendesak Komisi II DPR RI agar membantu masyarakat Papua merealisasikan misi ini.

Demikian mengemuka saat tiga kelompok masyarakat Papua beraudiensi dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo yang memimpin rapat tersebut menyambut baik delegasi masyarakat Papua yang ingin menyampaikan aspirasi pembentukan DOB. Delegasi yang menyebut dirinya

Tim 502 Kebangkitan Papua Tengah sangat antusias menyambut kehadiran Provinsi Papua Tengah tersebut.

Arif lalu membacakan surat Tim 502 saat membuka rapat dengar pendapat umum ini. “Berdasarkan Surat dari Tim 502 Kebangkitan Papua Tengah, proses pelaksanaan Provinsi Papua Tengah sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo,” katanya. Delegasi Tim 502 mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah setuju ada DOB di Papua. Tinggal sekarang yang dibutuhkan adalah Inpres untuk melicinkan jalan Papua Tengah menjadi provinsi.

Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah sudah dilakukan sejak 2004. Usulan ini sempat tersendat dan tak terdengar lagi gaungnya selama

18 tahun. Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua, usulan ini pun mengemuka kembali. Masyarakat Papua sudah meminta langsung kepada Presiden soal ini dan sekaligus menjadikan Biak sebagai ibu kota Papua Tengah.

Pemilihan Biak sebagai ibu kota Papua Tengah, selain sudah ada bandara internasional, Biak juga terhubung langsung dengan kawasan Pasifik. Delegasi ini juga mendesak Komisi II DPR RI agar tahun ini sudah ada pengesahan DOB di Papua. Perjuangan mewujudkan Provinsi Papua Tengah sangat panjang. Saatnya daerah ini mendapat akses DOB untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. ■ mh/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menerima audiensi Usulan Daerah Otonomi Baru kelompok masyarakat Papua. Foto: Andri/HR

Legislator Tegaskan BNPT Susun Peta Rawan Terorisme



Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan (kanan). Foto: Naefuroji/HR

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyusun peta dimana tempat dan media yang digunakan penyaluran paham terorisme. Menurutnya, desa, kampus, Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kelembagaan sejenisnya serta media sosial harus dibuat pemetaan dan grafik rawan terorisme.

“Saya tertarik pada pemetaan wilayah rawan radikal terorisme. Pertanyaan saya adalah, apakah pemetaan ini sudah selesai, dan jika sudah selesai di mana saja itu?” ujar Hinca saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan BNPT, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung

Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar BNPT membuat pemetaan, desa mana saja yang rawan terpapar paham terorisme. Karena pencegahan terorisme bisa dimulai dari desa. “Menurut saya menjaga republik ini, jaga saja desanya. Kira-kira lebih dari 78 ribu desa, saya kira kalau semuanya dapat, desa mana saja, ini menarik,” ungkap Hinca.

Lalu terhadap kampus, Hinca menyarankan agar BNPT bisa membentuk pusat kajian anti terorisme di kampus. Dia pun mengevaluasi cara sosialisasi terhadap paham kebangsaan di kampus yang masih dengan cara monoton. “Cara pandang

terhadap mahasiswa harus memiliki pendekatan yang berbeda dan progresif. Kita tidak dapat mengandalkan pola-pola memberikan materi kebangsaan, akan merasa menjenuhkan,” menurutnya.

Hinca juga menyarankan agar BNPT meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). “Ada 587 narapidana terorisme yang tersebar di lapas dan rutan (rumah tahanan) di seluruh wilayah, apakah ini juga sudah dipetakan?” tanya politisi dapil Sumatera Utara III itu.

Terkait, penyebaran paham terorisme di media sosial, menurutnya terorisme sudah mengakar kuat sekali di media sosial (medsos) dan pola penyebarannya sangat cepat. Dia pun mengungkapkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mencatat setiap hari ada sekitar 90 ribu konten terkait ISIS dan paham radikal lainnya, yang diunggah kelompok mereka ke medsos.

“90 ribu konten ini mau kita apakan? Setiap saat biasa diakses tanpa batas, analisa intelijen di sana mengamati bahwa para pengikut dan simpatisan bekerja 24 jam dalam membangun percakapan dan diskusi di media sosial dengan tujuan merekrut pengikut,” papar Hinca.

Dia pun mempertanyakan, apa yang menjadi program BNPT ke depan dalam hal mereduksi banyaknya infiltrasi paham terorisme melalui media sosial. Terlebih lagi saat ini masif bermunculan akun-akun anonim yang membuat Pemerintah dan BNPT kesulitan untuk melakukan monitoring paham yang cenderung teroris yang berserakan di dunia maya. ■ eko/es

Karhutla Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (kiri). Foto: Azka/HR

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menekankan bahwa sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus terus digencarkan kepada seluruh elemen masyarakat, agar masyarakat tahu pembakaran hutan dan lahan itu tidak boleh dilakukan. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, bupati, dan perangkat lainnya harus terus mensosialisasikan ke desa-desa yang sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya jika hanya mengandalkan Pemerintah pusat mustahil bisa berjalan dengan lancar. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang karhutla belum terlalu tegas dan masih ada tumpang tindih tentang

regulasinya. Ketua tim kunspek Komisi VI DPR RI menginginkan agar nanti UU-nya segera dipertegas lagi, dan bisa memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku pembakaran hutan.

“Dalam waktu dekat ini akan dibahas lagi dalam rapat internal, kita lihat UU apa yang tumpang tindih terkait karhutla, kita akan pertegas hukumannya terhadap pelaku pembakaran hutan jika perlu kita buat hukuman seumur hidup bagi pelaku pembakaran dan untuk korporasi yang melakukannya makan akan dicabut izin usahanya,” terangnya usai pertemuan dengan Danrem 042/Garuda Putih Kolonel Arh Elphis Rudy yang juga Komandan Satgas Pengamanan Karhutla, Provinsi Jambi, Kamis (7/11).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa dalam waktu

dekat, dia akan mengundang seluruh Gubernur Bupati, Satgas Karhutla dan Dinas Kehutanan serta *stakeholder* terkait daerah yang sering terkena dampak karhutla, untuk menyatukan visi bagaimana pencegahan agar tidak terulang kembali kebakaran hutan yang mengganggu kesehatan dan kehidupan aktivitas masyarakat.

“Kami undang semua duduk bersama agar mendapat solusi yang tepat menyatukan visi untuk mengatasi masalah ini tidak terulang kembali, karena kalau hanya sepihak saja itu tidak mungkin bisa selesai-selesai mencari solusinya,” tegas politisi dapil Lampung I ini.

Pada kesempatan yang sama Komandan Satgas Karhutala Kota Jambi yang juga Komandan Korem 042/Garuda Putih Elphis Rudy menambahkan bahwa dalam menangani kebakaran hutan ini, masih belum ada sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam menangani karhutla. Ia berharap besar kepada seluruh elemen yang ada untuk bersinergi sehingga masalah karhutla bisa diatasi. “Kepada seluruh pihak yang terkait untuk bersinergi agar nantinya kebakaran hutan bisa diminimalisir dan bisa cepat untuk penanganannya,” ungkapnya.

Dia pun memaparkan bahwa di Jambi sendiri, peralatan penunjang untuk satgas-satgas yang bertugas memadamkan api masih sangat minim. “Satgas-satgas di titik rawan api sudah memadai, tetapi peralatan yang digunakan masih kurang, Terkadang ini menjadi persoalan kita di lapangan, harus bergantian memakai alat-alat tersebut dan akibatnya menjadi memakan waktu yang lama untuk memadamkan api-api tersebut,” tutupnya. ■ azk/eko/es



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Kampar, Riau. Foto: Hendra/HR

Perlu Sinergi Lintas Kementerian Guna Atasi Karhutla

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menyoroti penanganan

kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Ia menilai perlu lebih banyak lagi sinergi lintas kementerian, pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat pun juga diminta bersinergi dalam penanganan kasus ini.

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini perlu kerja sama dan sinergi banyak pihak, antar kementerian dan Pemerintah pusat dan daerah. Kita dukung peningkatan sinergi dalam rangka mencari solusi kebakaran

hutan ini,” ujar Budi usai memimpin tim kunjungan kerja ke Rambo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis, (7/11).

Kejadian yang sudah rutin tiap tahun, ini harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama penegakan hukum. Politisi Partai Gerindra ini menilai penegakan hukum masih lemah. Sehingga Komisi IV DPR RI sepenuhnya mendukung aparat penegak hukum untuk lebih tegas lagi terhadap pelaku Karhutla yang disengaja.

“Kami sepenuhnya dukung penegakan hukum bagi yang sengaja melakukan pembakaran hutan karena resiko kebakaran hutan sangat besar,

mengganggu kesehatan dan ekosistem sehingga sangat sulit dirupiahkan,” legislator dari Kalimantan Timur itu.

Begitu juga dengan perusahaan atau korporasi, Budisatrio meminta aparat hukum bersikap tegas jika ada kelalaian bagi perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan. Salah satu hukum yang bisa diberikan adalah pencabutan izin.

Dari aspek penanganan kebakaran, Budi juga harus dibenahi, harus ada inisiasi baru agar kebakaran dapat segera dipadamkan. Seperti usul dari sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI agar dibuatkan embung di sekitar lokasi kebakaran hutan.

“Ada masukan terkait penanganan kebakaran hutan, seperti dibuatkan embung atau pengadaan pompa air. Namun jika itu memerlukan konsekuensi anggaran, maka Komisi IV DPR RI siap untuk memperjuangkannya,” lanjut Budi. Karena infrastruktur itu bukan bidangnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka penanganan kebakaran ini butuh sinergi lintas kementerian. ■ hs/es

Komisi V Minta Realisasi Anggaran 2019 PUPR Dipercepat

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2019 untuk dipercepat. Pasalnya hingga November 2019, realisasi anggaran baru sebesar 57,21 persen, sementara realisasi fisik baru sebesar 64,07 persen. Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong agar di sisa tahun 2019 ini, serapan anggarannya dapat segera dilakukan percepatan.

“Terhadap serapan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2019 Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat peningkatan realisasi APBN TA 2019 untuk mencapai prognosis 90-92 persen,” terang Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR dan Wakil Menteri PUPR, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Meski serapan anggaran tahun 2019 terkesan lambat, namun Komisi V DPR RI tetap memberikan apresiasi atas capaian realisasi program dan anggaran tahun 2015-2019 yang melebihi target rencana strategis pada beberapa program di bidang sumber daya air (SDA) dan konektivitas jalan dan jembatan. “Selanjutnya terhadap capaian realisasi kinerja yang belum memenuhi target Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menjadikannya bahan evaluasi dan masukan pada program kerja tahun 2020-2024,” lanjut Lasarus.

Masih kata politisi PDI-Perjuangan itu, untuk rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berdialog dengan Menteri PUPR. Foto: Runi/HR

untuk mempertajam program kerja Pembangunan Infrastruktur tahunan di masing-masing sektor, terutama pada program prioritas sesuai dengan saran dan usulan Komisi V DPR RI.

Dalam rapat perdana ini, Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR juga membahas sejumlah pandangan umum di bidang legislasi. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR

untuk bersama-sama mendorong sejumlah RUU dalam Prolegnas 2019-2024 yaitu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 68 Tahun 2004 tentang Jalan, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Sistem Transportasi Nasional dan RUU Tentang Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik). ■ hs/sf

Permendag Impor Semen Sebaiknya **Dicabut**

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada **Parlementaria** usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). Andre menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita *oversupply* ya. Kapasitas

produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita *oversupply* sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena *overcapacity production* dan *oversupply* terhadap semen Indonesia ini seharusnya

”

FENOMENA OVERCAPACITY PRODUCTION DAN OVERSUPPLY TERHADAP SEMEN INDONESIA INI SEHARUSNYA SEGERA DITANGANI KARENA MENYANGKUT KEPENTINGAN KEDAULATAN INDONESIA DI BIDANG PERDAGANGAN

segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami *over* kapasitas produksi *loh*. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas *oversupply* dan *overcapacity* ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. ■ *er/sf*

Anggota Komisi VI DPR RI
Andre Rosiade. Foto: Azka/HR



Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjadi pengawal rohani bangsa serta jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Berdasarkan beberapa petikan sejarah, isu radikalisme cukup berhasil membangun peradaban atau perjumpaan peradaban.

“Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tak pernah ada (Raja) Namrud berjumpa dengan (Nabi) Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, (Nabi) Musa tidak akan bertemu Firaun. Jika tidak ada radikalisme, maka (Nabi) Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, abu jahal,” kata Ali saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

”

HENDAKNYA MENTERI AGAMA SEBAGAI WASIT, JANGAN SAMPAI WASIT BERJALAN DI DALAMNYA, MAKA ANDA (MENAG) AKAN KEHILANGAN PEMAIN, DAN ANDA KEMUDIAN BERJALAN SENDIRI DI DALAMNYA

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher. Foto: Nafuroji/HR

Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan, kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan theologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme pada konteks politik yang menghancurkan peradaban.

Pihaknya setuju jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban. Namun kalau radikalisme digunakan untuk menghantam Negara, hal tersebut tentu harus dilawan, karena Islam mengajarkan

kesatuan bangsa itu *farḍhu ‘ain* (wajib). Oleh karenanya, lanjut Ali, Menteri Agama harus belajar apa itu agama dan apa itu *faith*.

“Tanpa agama tidak ada Kata ‘Atas berkat Rahmat Allah SWT’ dalam pembukaan UUD 1945. Bung Karno pun melahirkan kemerdekaan bangsa ini dengan kata ‘Atas nama bangsa’ yang artinya menghimpun bangsa, seluruh kekuatan bangsa ada di situ. Oleh karena itu belajar bijaklah dalam berjalan di dalam pelabuhan Nusantara ini. Hendaknya Menteri Agama sebagai wasit, jangan sampai wasit berjalan di dalamnya, maka anda (Menag) akan kehilangan pemain, dan anda kemudian berjalan sendiri di dalamnya,” papar Politisi asal dapil Banten III ini. ■ *ayu/es*



Komisi IX Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Foto: Jaka/HR

Komisi IX DPR RI tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan yang digelar pada 2 September 2019 lalu. Saat itu, disepakati untuk tidak menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

“Kenaikan iuran tersebut justru akan semakin membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, kami minta Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah yang

diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas III,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat membacakan salah satu kesimpulan rapat dengan mitra kerja terkait di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11) dini hari.

Pihaknya juga meminta Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BPJS bidang Kesehatan untuk menyelesaikan data *cleansing* terhadap 98,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena *exclusion error* dan *inclusion error* dalam penetapan PBI.

“Kami mendesak BPJS Kesehatan dan Pemerintah untuk memfinalisasi data *cleansing* sisa data PBI, dan

menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2019,” ungkap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemenuhan hak jaminan sosial terhadap banyaknya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang belum tergabung dalam jaminan sosial. “Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapat jaminan sosial. Maka kami mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mencari penyelesaian pemenuhan hak jaminan sosial bagi PPNPN,” tegas Ansory.

Komisi IX DPR RI juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia. “Selain penyelesaian tunggakan di RS, kami juga meminta Kemenkes untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga ISQua (International Society for Quality in Health Care),” tuturnya.

Rapat kerja yang selesai pukul 02.00 dini hari itu juga mendesak BPJS Kesehatan untuk merevisi Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga.

Komisi IX DPR RI kerap mendapat aduan terkait kurangnya kamar untuk peserta BPJS. Untuk itu Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur Kelas III di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). ■ rnm/es

Kemenpora Dituntut Fokuskan Bidang Kepemudaan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berdiskusi dengan Menpora. Foto: Jaka/HR

Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan terhadap Program Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI ke depan. Di antaranya perlu melakukan redefinisi terhadap cakupan pengelolaan bidang kepemudaan dan keolahragaan oleh Kemenpora RI, agar program serta kegiatan bisa fokus dan terarah.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi usai rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI Zainudin Amali di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). Dede mendorong agar program bidang kepemudaan dapat menyentuh seluruh elemen pemuda, termasuk kelompok pemuda yang memiliki stigma negatif.

Jika berbicara soal kepemudaan, ada dua poin yang menurut Dede penting yaitu antara memberdayakan pemuda atau mengembangkan kepemudaan. "Memberdayakan pemuda artinya melibatkan dalam berbagai *event* atau program besar negara. Tapi kalau pengembangan kepemudaan, kita harus melihat tantangan atau *challenge* pemuda khususnya millennial ini ke depannya

seperti apa? Lapangan kerja kah? Wirausahanya? *Entrepreneur*-nya?, sebaiknya memang harus di fokuskan," saramn Dede.

Politisi Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menyatakan bahwa kondisi kepemudaan Indonesia saat ini sangat sporadis. Oleh karena itu, ke depan Dede minta Kemenpora RI untuk lebih fokus kepada isu-isu yang jauh lebih penting. Termasuk di dalamnya mendorong pemuda yang memiliki stigma negatif untuk menjadi positif.

"Jadi jika kita berbicara sekarang, kenapa anak muda sekarang menjadi terlibat narkoba. Itu disebabkan karena tidak ada kegiatan yang positif. Kalau ada kegiatan positif, biasanya anak-anak tidak akan terlibat narkoba. Oleh karena itu, Kemenpora harus memfokuskan kepada gerakan-gerakan kepemudaan yang memang positif," tegasnya.

Ia mencontohkan beberapa kegiatan positif yang dapat dikembangkan untuk dapat menghilangkan stigma negatif pada pemuda Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan OSIS, Pramuka, dan Karang Taruna. Mengingat kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sangat penting, agar para pemuda Indonesia memiliki kegiatan yang positif, memotivasi dan menginspirasi dirinya.

"Ini kan semuanya punya kegiatan, hanya tidak terpayungi, tidak termotivasi, tidak *ter-support*. Jangan sampai malah akhirnya, mereka karena gak ada kegiatan lailah kepada hal-hal yang negatif. Jadi tetap menurut saya semua ada keterkaitannya. Perannya di Kemenpora bagaimana. Bukan bagaimana mencegah narkoba, tetapi isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga anak muda disibukkan dengan hal-hal yang positif," tutup legislator dapil Jawa Barat II itu. ■ ndy/es

Komisi XI Pertanyakan Strategi BI Hadapi Krisis Ekonomi

Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan strategi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak ramah, sebagaimana dikatakan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, ada kelemahan dari sisi pemerintah di mana kebijakan fiskal dan non-fiskal dinilai kurang bisa meng-*adjust* sehingga tidak bisa menimbulkan efektivitas yang baik. Pasalnya kebijakan non-fiskal seperti paket perekonomian dinilai kurang efektif.

“Kalau itu juga tidak bisa disesuaikan, artinya apa yang dilakukan oleh BI juga kurang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan Menko Perekonomian sekarang, bisa membuat kebijakan non-fiskal yang bisa meng-*adjust*,” kata Ramson saat Rapat Kerja dengan Gubernur BI beserta jajarannya, membahas mengenai realisasi 2019 dan prognosa 2020 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Salah satu kebijakan BI yang perlu disoroti politisi Partai Gerindra itu diantaranya penurunan suku acuan BI atau BI 7 Days Repo Rate (BI7DRR) dan memperbanyak likuiditas ke *market*, sehingga para pelaku ekonomi bisa longgar bergerak. Penurunan ini dinilai dapat menambah daya beli masyarakat, dimana saat ini pelaku ekonomi masih menghadapi suku kredit yang cukup tinggi yang berkisar 18-20 persen.

“Padahal dari sisi *demand*, bagaimana caranya masyarakat meningkatkan konsumsi rumah tangga itu memerlukan penurunan suku

bunga agar masyarakat sebagai agregat rumah tangga mampu membelanjakan dan meningkatkan permintaan. Dari sisi *supply*, para pengusaha juga saat investasi perlu suku kredit yang lebih rendah lagi. Perlu ada stimulus seperti ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkisar di 5,03 persen,” tambah legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Sayangnya, penurunan suku bunga pada aplikasinya di lapangan masih menemui berbagai masalah. Ramson mengatakan banyaknya bank-bank pelaksana yang belum melakukan suku bunga secara *real* di lapangan, sehingga kebijakan BI belum begitu diperhatikan. Nantinya, Komisi XI DPR RI perlu memanggil bank pelaksana yang tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi kepada masyarakat.

Tahun ini, pertumbuhan ekonomi pada ekonomi domestik masih terjebak pada kisaran 5 persen. Terakhir, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III yang dilihat dari produk domestik bruto (PDB) hanya dapat tumbuh sebesar 5,02 persen. BI memprediksi

pertumbuhan ekonomi baru bisa mencapai 6,162 persen pada 5 hingga 6 tahun mendatang.

Sementara untuk tahun mendatang, BI memperkirakan perekonomian dunia tumbuh ke 3,1 persen, menyusul adanya perang dagang AS-Tiongkok. Sedangkan untuk transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) diperkirakan ada di kisaran 2,5-3 persen, dengan laju inflasi terkendali 3 persen di tahun 2020. Kemudian, nilai tukar rupiah dipatok terjaga pada kisaran Rp 14.000-Rp 14.400 per satu dollar AS untuk tahun ini dan Rp 13.900-Rp 14.300 per dollar AS pada tahun 2020 mendatang. ■ atw/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian. Foto: Arief/HR

Baleg DPR Bangun Komunikasi dengan BK

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membangun komunikasi dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk mengarsiteki berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) ke depan. Baleg kali ini ingin mengetahui lebih jauh tugas dan fungsi BK DPR RI sebagai sistem pendukung (supporting system) bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama Baleg.

Rapat Baleg di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), menghadirkan jajaran BK yang dipimpin Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Inosentius Samsul. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (F-PPP) didampingi Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (F-Gerindra) dan dua wakil lainnya Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) dan Ibnu Multazam (F-PKB).

Sensi, sapaan akrab Inosentius mengemukakan, ini adalah undangan rapat resmi pertama yang meminta penjelasan BK tentang fungsi dan tugasnya sebagai sistem pendukung AKD. Sebelumnya, BK selalu diundang untuk menjelaskan suatu RUU di hadapan Baleg. "Ini penghargaan bagi kami untuk menjelaskan tugas-tugas di bidang legislasi," tutur Sensi.

Baleg sempat mempertanyakan dasar hukum berdirinya BK tersebut. Rieke menyampaikan beberapa dasar hukum di hadapan rapat tentang posisi BK DPR. Misalnya, Pasal 413A UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyebutkan, "BKD dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab

”

PEMISAHAN INI JUSTRU UNTUK MEMPERKUAT DAN MEMPERTAJAM DUKUNGAN ITU SENDIRI, TERUTAMA DI BIDANG LEGISLASI YANG MENJADI WILAYAH KERJA BALEG

kepada Badan Legislasi”.

Sementara itu, Sensi juga menjelaskan, berdirinya BK DPR RI dilatari pula pada pentingnya pemisahan dukungan administrasi dengan dukungan substantif. Pemisahan ini justru untuk memperkuat dan mempertajam dukungan itu sendiri, terutama di bidang legislasi yang menjadi wilayah kerja Baleg.

Selain itu, lanjut Sensi, BK DPR RI juga memberi pendampingan atas naskah Prolegnas, menyiapkan naskah akademik RUU, menyusun RUU,

dan pendampingan pembahasan setiap RUU di AKD. Bahkan, BK DPR RI juga menyiapkan konsep keterangan atas berbagai produk UU yang di-*judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Pada 2019 ini, BK menyiapkan 60 konsep keterangan untuk membantu anggota dewan di MK," katanya.

Pada bagian lain, BK DPR RI juga sedang mengevaluasi empat UU, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hasil pemantauan ini kelak akan diserahkan kepada Baleg. ■ mh/sf



Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi.
Foto: Arief/HR

Rehabilitasi Pasca Gempa Sulteng Harus Terus Diperhatikan



Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohammad Said (tengah). Foto: Nadya/HR

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohammad Said meminta Pemerintah terus melakukan pembenahan di Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu yang terjadi pada 28 September 2018 lalu.

“Rekonstruksi dan rehabilitasi perlu terus dilakukan untuk mengembalikan semangat masyarakat,” ungkapnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Cabang Bank Indonesia, Kakanwil Pajak dan Bea Cukai di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Senin (11/11).

Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak fasilitas umum dan sekolah sekolah yang belum tersentuh bahkan ada masyarakat yang masih

tinggal di rumah mereka yang terdampak bencana. “Ini menjadi perhatian kami. Negara harus hadir dan memberikan perhatian lebih serius bagi daerah-daerah rawan bencana. Terutama alokasi anggaran,” ungkapnya.

Pihaknya menyadari Sulteng mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang termasuk tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir dan tanah longsor. “Maka dari itu, perlu adanya realisasi dari upaya-upaya yang harus ditempuh Pemerintah untuk mengurangi risiko bencana alam yang tidak hanya akan berdampak pada perekonomian tapi keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menginformasikan bahwa kerusakan dan kerugian akibat bencana alam

Sulteng yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehab-Rekon Pascabencana, nilai kerusakan dan kerugian yang telah dikalkulasi adalah sebesar Rp 24,1 triliun dan nilai kebutuhan mencapai Rp 36,3 triliun.

Dengan rincian, hibah luar negeri sebesar Rp 235 miliar untuk membangun rumah rusak berat sebanyak 4.522 unit, lalu hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebesar Rp 1,9 triliun untuk perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 85.763 unit.

Kemudian bantuan hunian tetap dari berbagai yayasan kemanusiaan, Pemerintah Daerah se-Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 11.614 unit. Bantuan pembangunan sekolah masing-masing dari Pemda Provinsi Jawa Timur sebanyak 2 unit dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 unit.

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai di lapangan adalah pembebasan lahan untuk membangun hunian tetap dari pemilik lahan HGB dan HGU.

“Namun hal ini sudah dicarikan jalan tengah dengan kebijakan tidak memberi perpanjangan HGB atau HGU yang sudah habis masa berlakunya dan terhadap hak atas tanah yang jangka waktunya belum berakhir, diminta melepaskan haknya seluas kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap,” ungkapnya.

Di sisi lain, perekonomian Sulawesi Tengah terus membaik pasca bencana bahkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dirangkul dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai semester I Tahun 2019 sudah mencapai 6,62 persen.

“Melalui pertemuan ini diharapkan bisa menuntaskan permasalahan ataupun problem terkait keuangan di Sulawesi Tengah,” kata Longki. ■ rnm/es

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk. Dia mengungkapkan, saat ini banyak pekerjaan dan masalah di BPJS Kesehatan yang menunggu untuk dituntaskan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan dituntut mencari formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut termasuk juga soal defisit yang selalu bertambah.

Dia menegaskan, hendaknya BPJS Kesehatan dan Pemerintah tidak mengancam rakyat yang tidak mampu membayar iuran karena cara tersebut tidak efektif dan bukan solusi cerdas. “Kalau semuanya dibebankan pada peserta BPJS tentu membebani. Untuk itu, DPR RI minta formulasi yang lebih baik dan mencerdaskan masyarakat,” papar Saleh di Media Center DPR

”

BPJS KESEHATAN DAN PEMERINTAH TIDAK MENGANCAM RAKYAT YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR IURAN KARENA CARA TERSEBUT TIDAK EFEKTIF DAN BUKAN SOLUSI CERDAS

RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Dia menyarankan agar pemerintah menjalankan PR yang lalu, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melibatkan 1.800 auditor, ada 27,4 juta data yang ganda. Ada sekitar 6 juta yang Fasilitas Kesehatan (Faskes) nya tidak jelas,

tidak membayar iuran, tidak menjadi peserta BPJS lagi. Kapitasi uang menumpuk di Puskesmas Rp 2,5 triliun yang belum bisa ditarik oleh pemerintah, pembayaran uang lebih pada rumah sakit (RS) dan lain-lain.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini mengatakan, semua harus diselesaikan dan jika tidak, maka defisit akan makin besar. Tahun 2020 sekitar Rp 33 triliun, tahun 2021 defisit Rp 56 triliun dan seterusnya hingga ratusan triliun rupiah.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Kamis (24/10/2019) lalu, wacana naiknya iuran BPJS Kesehatan muncul dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebelum Kementerian Keuangan melemparkan tawaran kebijakan tersebut kepada Presiden. ■ eko/es



Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay (tengah) dalam diskusi di Media Center DPR RI. Foto: Arief/HR



Seminar Perpustakaan DPR Wujud Implementasi UU SSKCKR



Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti menyerahkan produk terbitan DPR RI kepada Kepala Perpustakaan RI Muhammad Syarif Bando disaksikan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Arief/HR

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menilai, seminar bertema “Akses Lengkap Karya Bangsa dan Penyerahan Terbitan DPR RI kepada Perpustakaan RI” yang diselenggarakan oleh Bidang Perpustakaan Setjen dan BK DPR RI merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya dan Rekam Karya Cetak (UU SSKCKR).

Ia menambahkan, dengan adanya UU SSKCKR, seluruh pihak wajib menindaklanjutinya, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo, yakni ‘SDM Unggul’. “(Untuk menciptakan) SDM unggul salah satu caranya harus banyak baca. Untuk itu kita harus punya kesadaran untuk mewarisi segala ilmu. Tentunya tidak hanya dalam buku. Bisa juga cetak ataupun elektronik,” katanya

saat memberikan sambutan dalam seminar yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Hadir menjadi pembicara dalam seminar ini, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah (F-Golkar), Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti. Dengan dihadiri oleh sejumlah pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, maupun instansi lainnya. Acara juga diisi dengan penyerahan secara simbolis produk terbitan DPR RI dan penyerahan cenderamata kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan narasumber lainnya.

Maya, sapaan akrab Damayanti mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang memiliki keahlian dalam

membuat tulisan terkait keahlian di bidang maupun unit kerjanya, yang dapat dijadikan terbitan berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, untuk menyimpan dan menyerahkan karyanya ke Perpustakaan DPR RI. Menurutnya, mungkin manfaatnya tidak dirasakan saat ini, namun di masa yang akan datang, karya yang telah diwariskan kepada perpustakaan akan bermanfaat bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.

“Kita mengimbau untuk (pegawai) yang di dalam DPR sendiri, teman-teman ini banyak bagian-bagian atau biro-biro yang menghasilkan cetakan-cetakan buku atau terbitan buku yang isinya itu ilmu. Nah itu juga saya imbau untuk juga menyerahkan ke perpustakaan 2 eksemplar per judul. Jadi, untuk itu saya menyambut baik ada seminar ini, bukan hanya untuk luar, tetapi untuk kita sendiri. Untuk kita sama-sama berkesadaran untuk menyimpan ilmu kita di perpustakaan,” pesan Maya.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando sendiri menilai adanya tren penurunan budaya baca di seluruh dunia diakibatkan adanya pengaruh media sosial. Oleh karena itu dirinya telah mengakali media sosial yang diakses melalui gawainya dapat bernilai 100 persen halal, jika digunakan untuk pengetahuan. Salah satu caranya dengan mengaplikasikan *digital retirement*.

“Bagaimana kita bersama seluruh komunitas memimpin orang tua, tokoh masyarakat, dan para pendiri meyakinkan para pemegang *handphone* atau generasi milenial akan menggunakan itu untuk kepentingan menggali ilmu pengetahuan yang sebaik-baiknya,” pesan Syarif. ■ ndy/sf

Perlu Sinergi MKD dan Aparat Penegak Hukum



Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy bertukar cenderamata dengan mitra kerja usai pertemuan di Mapolda Jawa Timur. Foto: Ayu/HR

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai perlu sinergi antara MKD dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan untuk menjaga etika dan marwah DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya dalam kunjungan kerja sosialisasi MKD ke Polisi Daerah (Polda) dan Jawa Timur.

“Ini merupakan kunjungan MKD pertama kali setelah dilantik dalam periode sekarang. Tujuan kami selain untuk memperkenalkan Pimpinan dan Anggota MKD yang baru, juga untuk mensosialisasikan program-program serta tugas pokok dan fungsi MKD dalam menjaga etika dan marwah DPR RI,” ujar Habib, begitu ia biasa disapa di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Jawa

Timur, Surabaya, Jatim, Senin (11/11).

Dalam menjaga etika dan marwah DPR RI, lanjut Habib, MKD perlu menciptakan sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sosialisasi tentang tata beracara MKD dalam menegakkan etika dan marwah DPR RI tersebut menjadi satu ikhtiar MKD. Terlebih lagi ada sekitar 98 Anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur. Hal ini tentu harus juga mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.

“Kami sudah menjelaskan aturan main dan tata beracara MKD. Karena yang harus diketahui di sini adalah pelanggaran etika belum tentu pelanggaran pidana, tapi pelanggaran pidana sudah pasti pelanggaran etika

DPR RI. Di sini kami harapkan jika polisi atau kejaksaan menemukan sebuah kasus yang terkait dengan etika Anggota DPR RI, agar menghubungi atau melaporkan kepada kami (MKD, red) terlebih dahulu,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Diakuinya, untuk menegakkan etika dan marwah DPR RI termasuk memeriksa Anggota DPR RI yang notabene merupakan rekan sesama Anggota Dewan, memang bukan sesuatu yang mudah. Namun ia menilai bahwa apa yang dilakukan MKD semata merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, ia meyakini MKD di bawah kepemimpinannya saat ini akan bertindak obyektif dan jauh dari unsur politis di dalamnya. ■ ayu/es

Layanan Jamkestama di RS Siloam Surabaya Sudah Maksimal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan tujuan Kunjungan Kerja BURT menuju Rumah Sakit (RS) Siloam Surabaya untuk melihat langsung kelengkapan fasilitas dan kecepatan pelayanan RS kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Anggota DPR RI dari Jawa Timur yang cukup banyak, untuk itu harus dipastikan pelayanan yang cepat dan tanggap.

“RS Siloam punya standar yang cukup bagus khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya ini. Fasilitasnya sudah lengkap dan pelayanannya

pun sangat maksimal,” imbuh Agung saat memimpin Kunker BURT DPR RI meninjau fasilitas dan pelayanan di RS Siloam, Surabaya, Jatim, Kamis (7/11).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan PT. Jasindo sebagai penyedia layanan Jamkestama harus segera merevisi dan melengkapi data-data dari setiap Anggota Dewan, dikarenakan periode ini jumlah Anggota DPR RI lebih banyak dari sebelumnya atau dari 560 Anggota menjadi 575 Anggota Dewan.

“Terkait data, ini yang harus segera diselesaikan oleh Jasindo sebagai penyedia layanan karena periode kali ini DPR mendapatkan tambahan

anggota yang jumlahnya cukup banyak. Belum lagi keluarganya, anak dan istri dan juga, agar mereka dan keluarga yang ingin berobat tidak perlu membawa kartu, cukup datang saja karena datanya sudah lengkap,” papar legislator dapil Jawa Barat I itu.

Agung menilai PT. Jasindo sebagai penyedia layanan Jamkestama kepada seluruh Anggota DPR RI, sudah jauh menjadi lebih baik lagi. Untuk itu diharapkan agar terus meningkatkan pelayanan. “Jasindo sudah bagus, semakin baik dari sebelum-sebelumnya, tentunya kita ingin agar terus meningkatkan pelayanannya lebih baik lagi,” harap Agung. ■ tr/es



Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Ketua BURT Agung Budi Santoso mengunjungi Rumah Sakit Siloam, Surabaya. Foto: Eko/HR



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya memimpin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11). Foto: Naefuroj/HR



Baleg DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Ketenagakerjaan di ruang rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11). Foto: Arief/HR



Kepala Bagian Sekretariat Bamus Setjen dan BK DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bojonegoro di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). Foto: Jaka/HR

